

PROSTITUSI DI JEMBER TAHUN 1974-2007 **“PROSTITUTION AT JEMBER ON 1974-2007”**

Ahmad Subur Jailani, Drs. Bambang Samsu, B.M.Si.
Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember
Jl. Kalimantan 37, Jember 68121
Email : Suburjailani@yahoo.com

ABSTRAK

Komersialisasi seks di Indonesia berkembang sejak masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, pelacuran telah memasuki semua kalangan masyarakat. Pada umumnya, praktek prostitusi memiliki tempat khusus yang disebut dengan lokalisasi. Para pelacur bekerja secara terorganisir dan diawasi oleh seorang yang disebut dengan *germo*. Akan tetapi tidak sedikit juga para pelacur yang tidak tergabung dalam lokalisasi atau mereka yang lebih memilih untuk bertebaran di berbagai tempat secara terselubung dalam melakukan prakteknya, seperti di hotel, wisma, musik room, taksi, tempat kost, panti pijat atau tempat lainnya. Di Jember praktek prostitusi disebabkan oleh keadaan ekonomi masyarakat yang tidak memadai, gaya hidup mewah serta budaya konsumtif yang masih melekat pada warga sekitar. Prostitusi di Jember tidak lagi dilakukan oleh kalangan dewasa saja, bahkan anak yang masih di bawah umur juga ikut serta di dalamnya. Fenomena ayam kampus dan gadis putih abu-abu juga banyak terjadi di Jember. Praktek prostitusi menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat sekitar. Penelitian ini menggabungkan metode sejarah dan sejarah lisan. Metode sejarah digunakan untuk mengkaji bagaimana fenomena prostitusi terjadi serta bagaimana muncul dan berkembangnya prostitusi di Jember. Metode sejarah lisan digunakan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjadi saksi atau terlibat langsung dalam peristiwa tersebut.

Kata kunci: *Menjual tubuh, Komersialisasi seks, Prostitusi di Jember.*

ABSTRACT

Since the Dutch colonial period commercialization of sex in Indonesia are growing. At that time, prostitution has been known by all people. In general, the practice of prostitution has a special place called localization. The prostitutes work in an organized and supervised by a pimp called. However, not a few prostitutes who prefer to work independently with doing practice in a variety of places, such as in a hotel, guest house, music room, a taxi, a boarding house, massage parlors or other places. In Jember, prostitution due to economic circumstances society is inadequate, luxurious lifestyle, and consumer culture that is still attached to the surrounding residents. Prostitution in Jember is no longer done by adults, even children who are minors also participate in it. Phenomenon that called ayam kampus and gadis putih abu-abu also occurred in Jember. Prostitution raises the pros and cons of the surrounding community. This study combines the methods of history and oral history. The method used to examine the history of how the phenomenon of prostitution going on and how the emergence and development of prostitution in Jember. Oral history methods are used to get information from the people who witnessed or were directly involved in the incident.

Keywords: *Sell the body, The commercialization of sex, Prostitution in Jember.*

1. Pendahuluan

Praktek prostitusi (pelacuran) adalah masalah klasik yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan manusia, namun tetap terasa baru untuk dibicarakan dan dibahas. Sulit menentukan secara pasti kapan munculnya profesi ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa prostitusi sudah terjadi sejak adanya norma perkawinan dalam masyarakat (Purnomo dan Siregar, 1983). Di banyak negara pelacuran itu dilarang bahkan dikenakan hukuman, juga dianggap sebagai perbuatan hina oleh segenap anggota masyarakat. Akan tetapi sejak adanya masyarakat manusia yang pertama hingga dunia akan kiamat nanti, “mata pencaharian” (bisnis pelacuran) akan tetap ada, sukar, bahkan tidak mungkin untuk diberantas dari muka bumi, selama masih ada nafsu seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati nurani (Kartono, 2005: 208).

Prostitusi dan pelacuran adalah suatu fenomena penyimpangan di lingkungan masyarakat yang sudah ada sejak lama, tidak terkecuali di Indonesia. Menurut *Encyclopaedia Britannia* (1973-74), pelacuran dapat didefinisikan sebagai: “Praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (Promiskuitas), untuk imbalan berupa upah dengan demikian pelacuran dikarakteristikkan oleh tiga unsur utama: pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.

Komersialisasi seks di Indonesia sepertinya berkembang sejak masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, pelacuran telah memasuki semua kalangan masyarakat. Bisnis seks terjadi di kota-kota besar. Pada umumnya, praktek bisnis di kota-kota besar ini memiliki tempat khusus yang disebut dengan lokalisasi. Para pelacur bekerja secara terorganisir dan diawasi oleh seorang yang disebut dengan *germo*. Akan tetapi tidak sedikit juga para pelacur yang tidak tergabung dalam lokalisasi atau mereka yang lebih memilih untuk bertebaran di berbagai tempat secara terselubung dalam melakukan prakteknya, seperti di hotel, wisma, musik room, taksi, tempat kost, panti pijat atau tempat lainnya (Sumiarni, 1999:6).

Prostitusi terus berkembang pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat peraturan pertama kali diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda tentang masalah

prostitusi. Pemerintah Hindia Belanda mentolerir praktek-praktek prostitusi, yang dalam peraturan ini wanita-wanita diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan seminggu sekali, jika ternyata di antara mereka ditemui terjangkit penyakit kelamin mereka harus dibawa ke rumah sakit dan setelah sembuh mereka diijinkan pulang.

Berkembangnya prostitusi disebabkan oleh banyak aspek dan sangat kompleks. Sesuai dengan studinya di Indonesia dan Philipina, Jones, et.al (1995) mengemukakan dua faktor penyebab meningkatnya pelacuran (*sex worker*) yaitu aspek *supply* dan *demand*. *Supply* berkaitan dengan *poorly educated* yang tinggi dan kemiskinan kalangan wanita atau masyarakat dibuktikan dengan proporsi mereka yang sangat tinggi di hampir semua jenis pelacuran. Aspek *demand* adalah semakin baiknya kesejahteraan dan kemampuan laki-laki untuk membeli pelayanan seks. Walaupun demikian menurut Susilo (1972) bahwa prostitusi tidak akan otomatis hilang dengan adanya perbaikan sosial ekonomi karena berkaitan dengan *demand*, selain berkaitan dengan *injustice* dan *exploitation*.

Menurut Reckless dan Soedjono (1977), kegiatan pelacuran dapat dibagi menjadi beberapa tipe dan kelas, yaitu pelacuran jalanan, terselubung, amatir, lokalisasi (bordil), dan panggilan (*call girls*). Adakalanya pelacuran yang transparan mungkin jumlahnya lebih besar daripada pelacuran yang tidak transparan, demikian sebaliknya. Pelacuran di masyarakat memang telah berkembang sedemikian kompleks dan menggejala dalam berbagai bentuk, sebagian dengan mudah dikenali dan sebagian lainnya sulit dikenali. Fenomena tersebut ada dan dapat ditemukan di kota-kota di Indonesia pada umumnya dan juga di wilayah pedesaan.

Jember yang dikenal sebagai kota santri serta kota baru bukan warisan dari kerajaan, tidak terlepas dari adanya praktek prostitusi. Masalah prostitusi tidak dapat dipisahkan dengan masalah kemiskinan. Saat ini di Indonesia masih banyak ditemui kemiskinan, sehingga bekerja sebagai PSK maupun mucikari merupakan suatu pilihan hidup di tengah-tengah keterpurukan ekonomi yang mencekik.

Dalam perkembangan dari waktu ke waktu kota Jember mengalami peningkatan yang sangat tinggi tentang pertumbuhan jumlah prostitusi liar.

Tempat-tempat prostitusi liar tersebut meliputi beberapa desa yang tidak terdata secara pasti. Melihat perkembangan yang demikian pada tahun 1972 pemerintah Kabupaten Jember berupaya memindahkan tempat prostitusi dari Gebang ke tempat lain di luar kota agar tidak mengganggu stabilitas sosial masyarakat perkotaan. Pemerintah daerah dalam hal ini tidak berani langsung memberantas atau menutup lokalisasi tersebut, tetapi memindahkan ke suatu tempat yang mudah untuk dikontrol. Selain itu, keberadaan prostitusi di Gebang dianggap sangat tidak cocok dengan adanya program perluasan wilayah kota. Oleh karena itu pemerintah daerah memindahkan prostitusi di Gebang ke tempat yang baru dan jauh dari kota, yakni Desa Kaliputih Kecamatan Rambupuji yang dianggap tepat untuk pemindahan.

Begitu kompleksnya permasalahan prostitusi pada tanggal 31 oktober 1989 ada sebuah perencanaan tentang lokalisasi prostitusi di Kaliputih untuk dipindahkan ke Puger karena alasan adanya suatu pemekaran kota dan di tempat prostitusi tersebut akan didirikan sebuah terminal petikemas. Alasan lainnya adalah untuk menjauhkan prostitusi dari permukiman masyarakat dan juga agar prostitusi berangsur-angsur lenyap di sebuah tempat yang sepi. Baru pada tahun 1990 telah terealisasi perpindahan lokalisasi wanita harapan dari Kaliputih ke Desa Puger Kulon Kecamatan Puger.

Ruang lingkup artikel ini meliputi skop spasial yakni Kabupaten Jember sedangkan skop temporal pada tahun 1994-2007. Dasar pertimbangannya adalah pada periode tersebut masalah prostitusi di Kabupaten Jember mengalami pertumbuhan yang cukup fenomenal sehingga mempengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat pada umumnya.

Rumusan masalah dari tulisan ini adalah : (1) faktor-faktor apa yang menyebabkan munculnya prostitusi, (2) bagaimana bentuk prostitusi yang ada di Jember, (3) bagaimana upaya pemerintah dalam menangani masalah prostitusi, dan (4) bagaimana dampak pasca penutupan lokalisasi prostitusi.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi, seperti teori yang dikemukakan oleh Roucek dan Warren yang mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu

yang mempelajari hubungan manusia dalam kelompok-kelompok (Soerjono, 1982:40). Aplikasinya adalah dalam lingkungan lokalisasi ada beberapa kelompok yang saling bekerja sama dan saling berhubungan. Kelompok-kelompok tersebut seperti para pekerja seks komersial (PSK), para pembantu, para tamu, dan para pembina atau tim rehabilitasi lokalisasi serta masyarakat sekitar lokalisasi.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teori kontrol yang dikemukakan oleh Hirschi 1969. Menurutnya, dalam kontrol sosial terdapat empat unsur utama yaitu *attachment* (kasih sayang), *commitment* (tanggung jawab), *involvement* (partisipasi) dan *believe* (kepercayaan). Ia mengungkapkan bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum (Narwoko, 2007:120). Sesuai dengan permasalahan prostitusi yang dibahas dalam penelitian ini, bahwa praktek-praktek prostitusi yang terjadi di Jember merupakan suatu penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat melakukan tindak penyimpangan terhadap norma-norma susila dan hukum yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya intergrasi sosial, kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Artinya bahwa keempat unsur yang terkandung dalam teori kontrol sosial kasih sayang, tanggung jawab, partisipasi dan kepercayaan tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat bahwa hubungan antara masyarakat kelas bawah, pemerintah dan pembuat norma serta aturan-aturan tidak terjalin dengan baik sehingga masyarakat merasa jauh dari pengawasan peraturan dan bebas melanggar peraturan yang telah disepakati bersama. Jika seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturannya kelompoknya. Tapi jika ada jarak sosial

sebagai hasil dari keputusan ikatan, maka seseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode untuk memudahkan penelitian agar mendapatkan hasil yang maksimal. Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah akan dianalisis mengenai data-data yang diperoleh dari para pelaku dan berusaha mencari pemecahan melalui analisis tersebut, tentang sebab akibat yaitu memaparkan tentang peristiwa yang terjadi dalam bentuk kausalitas.

Artikel ini menggunakan metode sejarah. Menurut Louis Gottschalk metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis dengan kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Proses yang akan menggambarkan kembali peristiwa masa lampau dengan data yang diperoleh, dengan sumber-sumber yang akan menunjang penulisan sebuah karya ilmiah (Gottschalk. Louis: 1975, 32).

Kuntowijoyo dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah, membagi langkah-langkah penelitian sejarah ke dalam lima tahapan, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan (Kuntowijoyo: 2005, 90).

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penulisan sejarah yang bersifat naratif, yaitu hanya memaparkan peristiwa sejarah dengan kaitan waktu dan tempat saja. Sumber sejarah diklasifikasikan menjadi dua yaitu sumber primer dan skunder. Sumber-sumber yang dipergunakan dalam penulisan artikel ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari kesaksian langsung dari seseorang, sedangkan sumber sekunder adalah kesaksian seseorang yang bukan saksi langsung atau pandangan mata. Sumber primer dapat diperoleh melalui wawancara dengan orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang keberadaan lokalisasi. Wawancara ini dapat dipakai sebagai bahan perbandingan terhadap sumber lain. Sumber sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, laporan atau penelitian dan dokumen. Untuk memperoleh sumber sekunder yaitu dengan jalan melakukan penelitian di perpustakaan. Penelitian di

perpustakaan digunakan untuk menemukan sumber-sumber tertulis yang mendukung setiap permasalahan yang akan dikaji. Observasi juga dilakukan dengan pengamatan langsung, untuk mendukung obyektifitas dari wawancara yang dilakukaan.

3. Perkembangan Perkebunan Di Jember

Jember sebelum tahun 1883 secara administratif merupakan bagian dari afdeling Bondowoso, yang jauh dari keramaian dan sepi penghuni yang pada tahun 1845 memiliki 36 desa dengan jumlah penduduk sebesar 9.237 jiwa. Akibat ada perubahan ekonomi yang ditimbulkan oleh perusahaan perkebunan jumlah penduduk Jember dan Puger pada tahun 1866 mengalami peningkatan dengan suku bangsa yang semakin beragam. Menurut Arifin, kala itu perusahaan partikelir Belanda yang bergerak dalam pembudidayaan tembakau terpusat di berbagai distrik utara afdeling Bondowoso: Sukowono, Wonosari, Penanggungan, dan Bondowoso (Tri Chandra, 1999: 170).

Pada awalnya, pengusaha ini menyewa tanah selama satu sampai lima tahun kepada penduduk setempat untuk ditanami jenis tembakau *Na-oogst*. Selain itu mereka juga membeli tembakau yang ditanam masyarakat tani setempat secara bebas. Untuk memperbesar dan mengembangkan usahanya mulailah mereka mengajukan permohonan kepada pemerintahan negara kolonial untuk mendapatkan hak *opstal*. Setelah disahkannya *Agrarische Wet* 1870, yang memberi kesempatan kepada para pengusaha untuk memanfaatkan tanah-tanah kosong dengan pemberian hak *Erfpacht*. Kalau merujuk pada adat-istiadat Jember, lahan pertanian baik yang berupa tanah tegalan maupun tanah sawah statusnya adalah tanah milik perorangan. Sejak saat itulah Jember berada dalam ruang yang didominasi oleh kekuatan *onderneming* yang didukung oleh sistem politik kolonial.

Sebelum kedatangan kaum *ondernemer*, penduduk Jember hanya berpenghasilan dari penjualan hasil tanaman pangan padi, jagung dan palawija. Keadaan seperti ini berubah ketika perusahaan perkebunan yang membawa peningkatan pendapatan lebih tinggi daripada sebelumnya. Beroperasinya berbagai perusahaan

perkebunan partikelir pada era kolonialisme di Jember telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk pembangunan ekonomi. Dalam prakteknya bisnis perkebunan tembakau di wilayah ini terdapat dua kelompok pengusaha yang sangat berperan, yakni *odernemer* dan *opkoper*. Kedua kelompok ini saling bersaing dalam mengeksploitasi tanah-tanah di Jember dengan keuntungan yang sangat besar.

Dengan adanya perusahaan perkebunan di Jember berarti telah berlangsung perubahan ekonomi, yang merupakan proses moral dan material. Dampaknya tidak hanya peningkatan pendapatan dan produksi, tetapi juga ada perubahan identitas, aspirasi dan otoritas.

Perkembangan perkebunan partikelir pada dasawarsa 1850-1860-an mengakibatkan masuknya modal-modal swasta ke pulau Jawa. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kolonial Belanda yaitu dengan memberikan sebagian modal usahanya kepada pihak swasta, khususnya untuk jenis tanaman yang kurang menguntungkan, seperti tebu dan tembakau. Perkembangan sistem ini ternyata mempengaruhi perkembangan tipe sistem ekonomi di Jember, di mana fase baru ini dimulai dengan dibukanya perkebunan tembakau pada tahun 1859.

Selama dasawarsa terakhir abad XIX perkembangan perkebunan di Jember sering terjadi fluktuasi. Usaha perkebunan diikuti dengan didirikannya perkebunan tembakau *N.V Landbhouw Maatsxhappij Oud Djember (LMOD)* oleh George Birnie (Wiwit, 1998:32-34). Kehadiran sistem perkebunan partikelir di Jember membawa perubahan sosial ekonomi pada masyarakat. Salah satu dampaknya yakni terjadi migrasi secara besar-besaran oleh etnis Madura dan Jawa ke Jember.

4. Jember Sebelum Tahun 1974

Hadirnya perkebunan di Jember berimplikasi terhadap kompleksitas sosial di kota Jember. Fenomena sosial yang bersifat urban akhirnya muncul di Jember, seperti munculnya slum area, tempat pelacuran, perjudian dan lain-lain. Untuk itu maka pihak Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan peraturan daerah terkait dengan timbulnya patologi sosial, seperti Perda tentang Perumahan Tidak Sopan, Perda tentang Pelacuran,

Perda tentang Warung Kopi, dan Perda tentang Minuman Keras. Dengan perkembangan kota Jember yang sangat pesat itu menimbulkan proses demoralisasi pada penduduk setempat. Demoralisasi masyarakat itu terlihat dengan banyaknya tindakan-tindakan kriminal seperti pencurian dan perampokan. Tingginya pencurian di Jember terlihat dari Laporan Residen Besuki tahun 1865 yang menyebutkan: 1) di daerah Besuki terjadi satu kali pencurian, 2) di daerah Panarukan terjadi 9 kali pencurian, 3) di daerah Banyuwangi terjadi 9 kali pencurian, 4) di daerah Bondowoso terjadi 2 kali pencurian, dan 5) di daerah Jember terjadi 36 kali pencurian (Edy Burhan, 2009: 95).

Pada tahun-tahun berikutnya pencurian di Jember terus meningkat terutama pada tahun 1880-an sampai 1890-an. Mengenai hal itu Residen Besuki pada tanggal 17 juni 1887 menulis surat pada pemerintah pusat yang isinya melaporkan bahwa volume pencurian di afdeling Jember sangat tinggi jika dibanding dengan afdeling-afdeling lain di Karesidenan Besuki untuk itu Residen Besuki, mengharapka adanya saran pemerintah pusat untuk mengatasi hal yang rumit itu. Tindakan kriminal lain yang sering terjadi di Jember ialah kasus pembakaran gudang-gudang tembakau milik para pengusaha tembakau.

Dalam kehidupan masyarakat terdapat penyakit sosial yang dikenal dengan pelacuran. Pada masa Hindia Belanda keberadaan PSK di Jember cukup meresahkan masyarakat maka dikeluarkan College Van Gedeputeerden Prov. Raad oost-Java tgl. 25-11-1931 No.W. 13/27/10 dan dalam Bijv. Prov. Blad. Oost-Java tgl. 31-12-1931 Serie C No.15 yaitu Perda mengenai rumah-rumah tidak sopan dan Colleg Van Gedeputeerden Prov. Raad Oost-Java tgl. 25-11-1931 No. W. 13/27/10 dan dalam Bijv. Prov. Blad Oost-Java tgl. 31-12-1931 Serie C No.15 yaitu mengenai tata susila di jalan umum di wilayah Kabupaten Jember. Praktek lokalisai PSK di Jember pada waktu itu bertempat di sebelah timur kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember, tepatnya di sekitar undak-undak selikur. Lokalisasi ini sangat strategis karena selain dekat alun-alun juga berada di pusat kota yang mudah dijangkau dari segala arah, sekaligus ramai orang berlalu lalang. Sehari-hari para pelacur sering disebut sebagai *begenggek*. Mereka melakukan kegiatannya

dengan mengenakan kebaya bersetelan kain batik, berselendang, rambut disanggul dengan dandanannya yang lebih menor dari wanita pada umumnya.

Prostitusi semakin ditekan maka akan mengakibatkan bertumbuhnya prostitusi versi baru yang semakin semarak. Seperti halnya di Kabupaten Jember pada tahun 1970-an pelacuran mulai marak bertempat di rumah bordir, seperti yang ada di wilayah Tegalboto, di daerah Talangsari mereka menamainya "Pothot", Sukorejo di sekitaran Jl. S.Parman (kediaman Pak Selor dan Bu Dul), Patrang (kediaman Pak Jumali), Gebang dan juga sepanjang Jl. Gajah mada yang sering disebut "Tumpeng". Semua itu sangat mengotori dan mencemarkan keindahan dan ketertiban kota.

Keluarnya surat keputusan Bupati Nomor 28 Tanggal 25 Juli Tahun 1974 adalah menginstruksikan menutup dan melarang semua kegiatan prostitusi dan rumah bordir di daerahnya masing-masing di luar kompleks lokalisasi rehabilitasi. Langkah selanjutnya menggerakkan pembinaan para WTS dan mucikari secara keseluruhan serta mencegah adanya bordir-bordir liar, mencabut izin hotel, losmen yang ternyata dipakai sebagai tempat pelacuran serta mengurus dan meneliti setiap tamu yang bermalam di hotel atau losmen yang patut dicurigai akan melakukan perbuatan melanggar hukum atau melanggar peraturan yang ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut atas penutupan bordir-bordir liar yang ada di wilayah perkotaan pada tahun 1974 Pemerintah Daerah Jember mendirikan lokalisasi yang bertempat di Desa Kaliputih, Kecamatan Rambipuji. Lokalisasi ini tumbuh dan berkembang menjadi pusat prostitusi legal. Alasan Kaliputih dijadikan pusat lokalisasi rehabilitasi dan prostitusi dikarenakan di Kaliputih merupakan tempat berkeliarannya wanita-wanita penjaja seks dan jauh dari kota.

5. Perkembangan Ekonomi Kapitalis Jember

Sejak ditemukannya tembakau jenis Na-Oogst pada dekade 1850-an (Kuntowijoyo, 1980:1) yang memiliki kualitas ekspor di wilayah Jember, ini bukan hanya merupakan petanda awal bagi proses kapitalisasi oleh perusahaan perkebunan partikelir di daerah ini, tapi juga sekaligus merupakan suatu fase pertumbuhan dan berkembangnya secara

nyata Jember sebagai kota (Abdurachman,1987:258). Pada titik inilah kemudian Jember lahir sebagai kota industri perkebunan. Ia adalah sebuah kota yang lahir dari sebuah proses modernisasi kota-kota Hindia, sebagai akibat dari sistem perusahaan bebas yang dianut sebagai prinsip umum ekonomi sejak masuknya kapital besar, periode akhir abad XIX.

Akibat adanya kekuatan kapital besar tersebut mulailah berlangsung proses semacam "pemaksaan" proses pembangunan, baik itu sarana infrastruktur perusahaan, maupun prasarana utama kota Jember. "Pemaksaan" tersebut dilakukan dalam rangka mendukung proses kelancaran produksi berbagai perusahaan perkebunan partikelir yang ada di wilayah Jember.

Pada akhirnya, periode inilah lahir berbagai perusahaan perkebunan partikelir di sebaran wilayah Jember dan membentuk satu struktur kota baru. Adanya sistem perusahaan partikelir yang menganut sistem secara bebas, sebagai prinsip umum ekonomi yang dianut sejak pertengahan abad XIX, mempunyai arti penting dalam bidang pembangunan perkotaan. Hal tersebut tidak hanya dalam pengertian meningkatkan perdagangan dan meningkatkan industri pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga mengakibatkan kenaikan cepat pada populasi perkotaan, tetapi juga inisiatif individual yang tidak terkendalikan yang tampak jelas dalam luasnya skala perluasan kota.

6. Prostitusi Di Jember Tahun 1974-2007

Lokalisasi pertama yang dilegalkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember setelah jaman kemerdekaan adalah lokalisasi yang bertempat di Desa Kaliputih Kecamatan Rambipuji. Pada mulanya lokasi kompleks prostitusi merupakan bekas gudang tembakau milik PTP XXVII yang digunakan untuk menampung hasil panen tembakau daerah sekitarnya. Pada tahun 1972, gudang ini benar-benar mengalami rusak berat. Oleh karena itu banyak aktivitas pertembakauan terbengkalai dan tidak lagi digunakan sebagai tempat penyimpanan tembakau. Jadi lokalisasi ini merupakan hamparan bekas gudang yang terbengkalai dan pada akhirnya tempat ini sering dijadikan mangkal para WTS liar sekaligus dijadikan tempat untuk transaksi seks (Hadi Prayitno, 1990:8).

Banyaknya WTS liar yang berdatangan baik yang berasal dari wilayah Gebang dan daerah sekitarnya ke Dusun Kaliputih tersebut, maka dipandang perlu bagi mucikari untuk mendirikan bangunan yang digunakan sebagai sarana transaksi. Pendirian bangunan ini misalnya bangunan rumah, warung, kios dan rumah berpetak lainnya. Semaraknya bangunan yang didirikan tersebut merupakan tanda bahwa lokasi ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang datang untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Lokasi ini tidak salah lagi disebut dengan perkampungan baru bagi para WTS.

Atas dasar berbagai pertimbangan dan studi kelayakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 1974, tempat tersebut dijadikan sebagai lokalisasi legal berdasarkan SK Bupati No. 28 Juli Tahun 1994. Pada awalnya pengelokalisasian para WTS berjalan dengan baik walaupun dalam pelaksanaan banyak mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan banyaknya WTS yang kurang sadar tentang maksud dan tujuan pemerintah melokalisir dan merehabilitasi.

Lambat laun keberadaan lokalisasi di Desa Kaliputih Kecamatan Rambipuji mendapat ancaman dari berbagai elemen masyarakat, karena lokalisasi ini dianggap tidak layak dan harus dihapuskan. Wacana penutupan lokalisasi di Dusun Kaliputih, Desa Kaliputih, Kecamatan Rambipuji sudah ada sejak tahun 1979, di saat Jember di pimpin oleh Bupati Supono, meskipun ancaman dilakukan secara lisan. Namun ancaman tinggal ancaman, ternyata rencana penutupan itu gagal karena para mucikari bisa melakukan perundingan dengan DPRD Kabupaten Jember. Setelah kejadian tersebut, rencana penutupan tidak lagi ada hingga tahun 1984. Kemudian pada saat pergantian bupati yang baru, yaitu Bupati Priyanto Wibowo, barulah muncul kembali rencana penutupan lokalisasi di Kaliputih. Akan tetapi rencana tersebut gagal kembali karena warga prostitusi lagi-lagi bisa melakukan berbagai perundingan dengan Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) (Muclas Adiputra, 2013:32).

Selanjutnya, baru pada tanggal 31 Oktober 1989 ada sebuah pernyataan tentang adanya penutupan lokalisasi di Kaliputih oleh pemerintah Kabupaten Jember. Di tahun inilah lokalisasi Desa

Kaliputih Kecamatan Rambipuji berhasil ditutup secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Jember. Ditutupnya lokalisasi di Desa Kaliputih, para WTS dan mucikari operasionalnya dipindahkan ke Puger dengan alasan dalam rangka pemekaran kota dan di kawasan Rambipuji, tepatnya di stasiun kereta api Rambipuji akan didirikan sebuah terminal patikemas. Alasan lainnya adalah untuk menjauhkan prostitusi dari pemukiman masyarakat sehingga lokalisasi harus dipindahkan di tempat yang sepi.

Dengan ditutupnya prostitusi di Kaliputih kemudian daerah operasionalnya dipindahkan ke Puger Kulon, maka para mucikari membawa serta para PSK yang masih setia mengikutinya. Ada juga para PSK yang tidak bersedia pindah ke Puger Kulon melainkan mencari lokalisasi prostitusi yang baru, baik di dalam maupun di luar Kabupaten Jember. Dengan adanya keputusan ini, maka munculah prostitusi kecil-kecilan secara terselubung di beberapa tempat seperti di Wuluhan, Balung maupun Ambulu bahkan ada yang beroperasi di wilayah perkotaan Jember.

Prostitusi memang selalu menimbulkan pro dan kontra, antara setuju dan tidak setuju, suka dan tidak suka, demikian halnya yang terjadi di lokalisasi Puger. Setelah dipindahkannya lokalisasi dari Kaliputih ke Puger oleh pemerintah daerah, sebagian elemen masyarakat menganggap bahwa lokalisasi sebagai penyakit masyarakat dan harus ditutup. Pada tahun 1998, beberapa ulama Jember seperti Gus Mamak (Madini Faruq), Kyai Tuki (Kencong), Gus Fikri (Gebang) dan berbagai ulama lainnya mereka menganggap bahwa pemindahan lokalisasi prostitusi di Puger akan menjadikan tempat yang dijuluki wilayah santri tersebut ternodai. Sebagai reaksi atas pandangan tersebut munculah pengerahan masa untuk penutupan lokalisasi di Puger yang pada saat itu melibatkan masa preman, pada tanggal 3 April 1998. Walaupun demikian upaya penutupan lokalisasi tersebut mengalami kegagalan. Upaya tersebut kemudian kembali diulangi pada beberapa hari berikutnya dengan pengerahan massa yang diikuti oleh 11 ulama yang dimotori oleh Gus Mamak beserta anggota Komisi E DPRD Kabupaten Jember untuk menutup lokalisasi Puger.

Penutupan lokalisasi pada dasarnya bukan merupakan hal yang mudah. Implikasi yang

ditimbulkan bagi para mucikari dan PSK atas penutupan lokalisasi berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan hidup mereka. Adanya persoalan tersebut, satu minggu kemudian para mucikari mendatangi DPRD untuk membela nasib mereka dan meminta keadilan. Selanjutnya dengan difasilitasi oleh komisi E DPRD Kabupaten Jember serta berbagai instansi di Kabupaten Jember, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, akademisi, LSM, kalangan profesi, tokoh masyarakat dan warga masyarakat, sehingga menghasilkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 14 Tahun 2001 yang di dalamnya berisi keputusan bahwa prostitusi Puger Kulon dinyatakan sebagai Tempat Pelayanan Sosial Transisi (TPST). Misi yang diemban pemerintah dengan mendirikan TPST adalah untuk merubah keadaan yang sebelumnya merupakan prostitusi murni dijadikan tempat untuk mencetak para mucikari dan PSK agar dapat beralih profesi sebagai tenaga kerja di sektor lain, baik formal maupun informal.

Prostitusi memang selalu menimbulkan pro dan kontra, antara setuju dan tidak setuju, suka dan tidak suka, demikian halnya yang terjadi di lokalisasi Puger Kulon yang oleh sebagian elemen masyarakat dianggap sebagai penyakit masyarakat dan harus ditutup. Penutupan lokalisasi menjadi semacam dilema, di satu sisi ada yang menolak namun di sisi lain banyak yang mendukung dengan alasan bertentangan dengan nilai moral, agama, dan kesusilaan. Penutupan lokalisasi Puger Kulon bukan merupakan hal yang mudah dan sederhana, karena dalam realisasinya banyak terjadi kontroversi berupa tarik ulur dan konflik. Kontroversi terjadi antara pihak pemerintah Kabupaten Jember dan beberapa elemen masyarakat yang berkepentingan menutup lokalisasi dengan dalih untuk menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat. Sebelumnya para PSK, mucikari, pedagang sekitar lokalisasi, dan golongan masyarakat lain tidak setuju dengan penutupan lokalisasi, karena mengancam kehidupan mereka secara langsung. Pada tahun 2007, berselang enam tahun sejak diberlakukannya Tempat Pelayanan Sosial Transisi, Pemerintah Kabupaten Jember yakin TPST berfungsi maksimal sehingga cukup alasan untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Jember No 188.45/39/012/2007 yang dikeluarkan

pada tanggal 6 Maret 2007 tentang Penutupan TPST dan Penutupan Prostitusi Liar di Kabupaten Jember. Sebagai tindak lanjut dikeluarkanlah Surat Edaran (SE) Bupati Jember No. 466/283/436.03/2007 tanggal 6 Maret 2007 tentang Penutupan TPST. Berdasarkan SE tersebut, bahwa TPST lokalisasi Puger Kulon terhitung tanggal 1 April 2007 ditutup secara total, sedangkan untuk prostitusi lainnya di Kecamatan Puger penutupan dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2007 sampai dengan selesai. Surat Keputusan Bupati Jember No.188.45/39/012/2007 dan Surat Edaran Bupati Jember No 466/283/436.03/2007 tersebut disosialisasikan melalui Camat Puger pada tanggal 22 Maret 2007 dengan Nomor Surat 466.137/436.522/2007 untuk selanjutnya agar diteruskan dan disosialisasikan kepada ketua RW 09, RT 01 RT 02 dan RT 03 di Kecamatan Puger Kulon.

Dengan ditutupnya lokalisasi Puger Kulon terjadi persebaran PSK yang sebagian besar eksodus keluar daerah. Selain itu, ada juga PSK yang tersebar di beberapa tempat seperti di pinggir jalan dan warung remang-remang, antara lain di daerah Wuluhan, Balung dan Ambulu serta di wilayah perkotaan Jember. Sampai saat ini walaupun sudah ada papan pengumuman telah ditutupnya lokalisasi Puger Kulon di pintu masuk lokalisasi namun lokalisasi Puger Kulon masih tetap eksis walaupun tidak sebesar dulu. Beberapa waktu lalu kerap ada razia yang dilakukan oleh para aparat Satpol PP dan polisi. Namun pada saat ini hal tersebut sudah tidak lagi dilakukan.

7. Kesimpulan

Prostitusi di Jember terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor utamanya adalah faktor ekonomi. Aktivitas prostitusi di kota Jember dibedakan menjadi tiga bentuk prostitusi yakni prostitusi liar, prostitusi terselubung, dan prostitusi legal. Prostitusi liar dan terselubung tersebar di hampir seluruh wilayah Jember sedangkan prostitusi legal hanya terdapat di dua desa, yaitu Desa Kaliputih Kecamatan Rambipuji dan Desa Puger Kulon Kecamatan Puger. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember kini Keberadaan Prostitusi legal telah ditutup. Dengan ditutupnya lokalisasi tersebut diharapkan mampu memberantas penyakit sosial yang

meresahkan di tengah-tengah masyarakat, namun ternyata justru menimbulkan masalah baru yakni semakin maraknya kegiatan prostitusi baik liar dan terselubung maupun yang terang-terangan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Jember. Keadaan yang demikian ini justru akan lebih menyulitkan bagi Pemerintah dalam mengawasi dan melakukan kontrol terhadap para pelaku prostitusi. Hal ini hendaknya segera mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah Jember agar keberadaannya tidak meluas dan menjadikan Jember sebagai kota dengan lembah hitam yang tinggi.

Narwoko, Dwi. "Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan". Jakarta: Gramedia, 2007.

Sumiarni, Endang dkk. 1999. "Seks dan Ritual di Gunung Kemukus". Yogyakarta: PPK:UGM.

Soekanto, Soerjono. "Sosiologi Suatu Pengantar". Jakarta : Gramedia, 1982 .

Internet

SangkarDada, <http://www.sorotjember.blogspot.com>
judul artikel: lokalisasi Jember kembli beroperasi?
Diunduh tanggal 12 Desember 2012.

DAFTAR PUSTAKA

Adiputra, Muclas. "Kontroversi Penutupan Lokalisasi Puger Kulon Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2001-2007", *Skripsi* pada jurusan Sejarah, Universitas Jember 2013.

Arifin, Edy Burhan dkk. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perkembangan Kabupaten Jember Buku 1 (Satu)", Jember: 2009.

Arifin, Edy Burhan. "Pertumbuhan Kota Jember dan Munculnya Budaya Pandhalungan" *Makalah*, dipresentasikan pada Konferensi Sejarah Nasional VIII. Jakarta: 2006.

Ap, Tri Chandra. "Kota dan Kapitalisme Perkebunan: *Jember dalam Perubahan Zaman 1900-1970*", Surabaya: 2004.

Gottschalk, Louis. "Mengerti Sejarah", (Terj. Nugroho Notosusanto), (Jakarta: UI Press, 1986).

Hadi Prayitno. "Respon Masyarakat Sekitar Lokalisasi terhadap kebijaksanaan Pemindahan Lokalisasi ke Kecamatan Puger Kab Dati II Jember", Jember: 1990.

Kartono Kartini. "Patologi Sosial", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Kuntowijoyo. "Metodologi Sejarah" (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).

Kuntowijoyo. "Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940" (Desertasi Doktor pada Universitas Columbia USA, 1980).